

Hambatan ASEAN sebagai Organisasi Regional Dalam Merealisasikan Pertahanan dan Keamanan Terkait Kerjasama AUKUS (Australia, United Kingdom, dan United States)

Wiwi Ramadani, Ahyul Haitsam

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ushuluddin Filsafah dan Politik

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ramadaniviwi5@gmail.com

ABSTRACT

The trilateral defense pact otherwise known as AUKUS is now the main highlight of ASEAN as a regional organization. The existence of this defense pact has its own influence on the stability of regional defense and security, but the sustainability of this defense pact makes ASEAN have its own difficulties in overcoming it. Therefore, this problem is what the author raises as a formulation of problems related to the obstacles faced by ASEAN in realizing its regional defense and security related to the AUKUS defense pact. In studying this phenomenon, the author uses qualitative research methods with data sources in the form of secondary data through literature studies, observation data and audio-visual. With the results of this research, it can be seen that ASEAN has experienced obstacles in completing the defense pact due to the influence of ASEAN principles and membership itself. Thus, the author explains clearly and descriptively related to the obstacles experienced by southeast Asian regional organization. The author hopes that this paper will be able to become a reference or further study of all readers.

Keywords: ASEAN countries, defense pact, barriers

ABSTRAK

Pakta pertahanan trilateral atau dikenal dengan AUKUS kini menjadi sorotan utama ASEAN selaku organisasi regional. Adanya pakta pertahanan ini memberi pengaruh tersendiri bagi stabilitas pertahanan dan keamanan kawasan, namun keberlanjutan pakta pertahanan ini membuat ASEAN mengalami kesulitan tersendiri dalam mengatasinya. Oleh karenanya, problematik inilah yang diangkat penulis sebagai rumusan masalah terkait hambatan yang di hadapi ASEAN dalam merealisasikan pertahanan dan keamanan kawasannya terkait pakta pertahanan AUKUS. Dalam mengkaji fenomena ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data berupa data sekunder melalui studi pustaka, data observasi dan data audio-visual. Dengan adanya hasil riset ini, dapat diketahui bahwa ASEAN mengalami hambatan dalam menyelesaikan pakta pertahanan tersebut karena pengaruh prinsip dan keanggotaan ASEAN itu sendiri. Sehingga, penulis memaparkan secara jelas dan deskriptif terkait hambatan yang dialami organisasi regional Asia Tenggara. Penulis berharap dengan adanya tulisan ini mampu menjadi referensi atau kajian yang lebih lanjut terhadap seluruh pembaca.

Kata kunci: negara ASEAN, pakta pertahanan, hambatan

PENDAHULUAN

Dalam konteks organisasi internasional, hal yang menjadi fokus utama adalah peran dan fungsi organisasi internasional dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam studi kasus yang diangkat, titik fokus mengarah pada peran dari ASEAN selaku organisasi regional di kawasan Asia Tenggara terkait pertahanan dan keamanan. Dalam suatu kawasan, bidang pertahanan dan keamanan selalu menjadi hal yang difokuskan secara sentral. Seperti halnya peristiwa yang belum lama ini terjadi terkait penguatan kerjasama di bidang militer, dimana negara-negara kawasan Asia Tenggara dikejutkan dengan adanya kerjasama trilateral oleh tiga negara yang memiliki pakta pertahanan yang berpengaruh di dunia, yakni Australia, Amerika Serikat, dan Inggris. Kerjasama ini dibentuk sebagai upaya peningkatan pakta pertahanan dan keamanan kawasan Asia Tenggara. AUKUS atau akronim dari Australia, United Kingdom, dan United States merupakan suatu bentuk kerjasama dalam memperkuat pertahanan militer suatu kawasan. Kerjasama ini memiliki tujuan utama yakni membuat kapal selam bertenaga nuklir dalam memperkuat pertahanan kawasan Asia tenggara pada bagian laut.¹

Dalam penarikan sejarah awal dan penyebab terbentuknya kerjasama AUKUS, dapat dilihat bahwa ini adalah salah satu manuver politik Amerika Serikat dalam memberi pengaruh di kawasan Asia. Hal tentunya berkiblat pada konflik Amerika Serikat dan China yang mengalami hegemoni keamanan. Seperti yang terlihat dalam dunia Internasional, China berupaya memberi pengaruh yang cukup signifikan di kawasan Asia terutama Asia tenggara dengan adanya klaim China di kawasan Laut Cina Selatan. Melalui klaim ini, China berupaya memberi pengaruh kepada seluruh negara-negara kawasan serta memberi ketergantungan tersendiri terhadap negara-negara tersebut. Ini lah yang dilihat oleh Amerika Serikat selaku negara yang melakukan hegemoni dengan China. Upaya manuver pun dilakukan Amerika Serikat untuk juga memberi pengaruh terhadap kawasan Asia Tenggara khususnya, dengan membuat sebuah kerjasama dalam aspek pertahanan dan keamanan kawasan.

Dengan situasi yang semakin komprehensif, kerjasama AUKUS di retifikasi pada 15 September 2021 dengan tujuan menciptakan kapal selam bertenaga nuklir dengan kemampuan dan kapasitas yang jauh lebih canggih. Melalui kerjasama ini, Amerika Serikat dan Inggris akan melakukan transfer teknologi pemberian fasilitas kepada negara Australia sebagai bentuk kompleksitas kerjasama. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang pertama kali dilakukan Amerika Serikat dalam berbagi teknologi kepada Australia. Dimana, seperti yang diketahui bahwa Amerika Serikat hanya berbagi teknologi kepada Inggris. Negara Australia dipilih oleh negara-negara power dalam aspek kerjasama, sebab negara ini adalah sekutu dari Amerika Serikat serta memiliki kedekatan yang sangat sentral dalam aspek geografis. Selain itu, negara Australia juga bukanlah bagian dari kawasan Asia Tenggara, sehingga Amerika Serikat dapat dengan mudah melakukan hubungan kerjasama. Bahkan peningkatan teknologi kapal selam bertenaga nuklir dipilih oleh Amerika Serikat, Australia dan Inggris karena negara-negara yang dituju dalam hal ini kawasan Asia Tenggara

¹ Palabbi, Sahbuddin Dg., "Pakta Pertahanan AUKUS: Respon Negara-Negara ASEAN Dan Peran Indonesia.," 2022.

termasuk dalam kawasan yang memiliki wilayah laut yang cukup luas dan strategis, serta termasuk wilayah jalur perdagangan dunia.²

Teknologi kapal selam yang diciptakan oleh Australia, Amerika Serikat dan Inggris merupakan teknologi tercanggih yang belum pernah tercipta sebelumnya di Angkatan Laut. Berdasarkan informasi, kemampuan yang dimiliki oleh kapal selam bertengas nuklir ini, diantaranya mampu menyelam berbulan-bulan, mampu menembak krusial dengan jarak jauh, serta menggunakan tenaga nuklir dalam pengoperasiannya. Hal ini tentu menjadi ketakutan tersendiri bagi seluruh negara saat negara tersebut sedang menciptakan atau memiliki alat persenjataan bertenaga nuklir. Kekuatan nuklir dalam bidang militer sangatlah diantisipasi, sebab kekuatannya mampu memberi dampak bagi seluruh negara di dunia.³

Dalam pakta pertahana trilateral ini, salah satu aktor AUKUS dalam hal ini Australia kini menjadi sorotan bagi negara-negara Asia Tenggara. Sebab, dalam aspek geografis negara Australia memanglah bukan bagian dari Asia Tenggara tetapi merupakan salah satu negara yang lokasi sangat dekat dengan kawasan Asia Tenggara. Hal ini yang menjadi penilaian tersendiri bagi beberapa negara kawasan, karena keterlibatannya dalam kerjasama AUKUS dinilai sepadan dengan merusak hubungannya dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Negara yang masuk dalam kategori tersebut diantaranya negara Indonesia dan Malaysia, sedangkan negara yang memiliki keterikatan pro dengan Amerika Serikat pasti masih menyetujui adanya kerjasama yang dijalin Australia, seperti negara Filipina, Singapura dan Vietnam.

Asia Tenggara sebagai kawasan yang sangat strategis tentu menjadi ironi tersendiri bagi adanya kerjasama ini. Hampir semua negara kawasan Asia Tenggara memiliki hubungan dan keterikatan dengan negara China dan Amerika Serikat, baik hubungan secara bilateral maupun secara multilateral. Inilah yang menjadi problema organisasi regional kawasan, ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara harus menjadi wadah dasar penyelesaian problema ini. Hal ini sesuai dengan tujuan utama terbentuknya organisasi regional ASEAN, yakni menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Bukan hanya itu, di kawasan Asia Tenggara juga memiliki suatu bentuk preferensi yang dijalankan oleh ASEAN selaku organisasi regional. Preferensi ini adalah bentuk dimana negara-negara tidak diperbolehkan dalam penggunaan nuklir sebagai upaya penyelesaian atau pengantisipasi konflik. Inilah yang disebut sebagai Traktat Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara atau di singkat dengan "Traktat SEANWFZ". Aturan ini tentu sejalan dengan prinsip yang di pegang oleh ASEAN tentang prinsip non-intervensi. Dalam konteks kerjasama AUKUS yang memiliki tujuan memperkuat pertahanan dan keamanan negara kawasan tentu mengalami kontradiksi dengan aturan atau preverensi yang ada. Dimana, tindakan AUKUS yang menggunakan nuklir dalam peningkatan pertahanan melanggar Traktat Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara. Hal inilah yang menjadi problematik kerjasama AUKUS, sehingga dianggap dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Oleh karena ini, tulisan ini menekankan pada peran dari organisasi regional dalam mengantisipasi ancaman yang dihadapi negaranya kawasan, ASEAN sebagai organisasi regional kawasan Asia Tenggara

² Annisa Putri Nindya and Rifqy Alief Abiyya, "Pengaruh AUKUS Terhadap Stabilitas Indo-Pasifik Dan Sikap Indonesia [The Influence of AUKUS to Indo-Pacific Regional Stability and Indonesia's Stance]," *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 13, no. 1 (June 20, 2022): 67–84, <https://doi.org/10.22212/jp.v13i1.2917>.

³ Prakoso, Lukman Yudho, "AUKUS Peluang Dan Kendala Bagi Indonesia," *Jurnal Maritim Indonesia* 9, no. 3 (2021).

kini dipertanyaan posisi dan perannya. Sehingga dalam tulisan ini penulis muat sebuah rumusan masalah yang menjadi pertanyaan terbesar dari kasus yang diangkat, yakni bagaimana posisi dan peran ASEAN dalam menghadapi pakta pertahanan trilateral yang dibungkus dalam sebuah kerjasama (kerjasama AUKUS)?

KERANGKA BERFIKIR

Secara teoritis, untuk menganalisis peran ASEAN sebagai organisasi regional terhadap stabilitas pertahanan dan keamanan kawasan Asia Tenggara melalui kerjasama AUKUS, maka penulis mensinkronisasikan beberapa teori tunjangan sebagai tumpuan dalam analisis pembahasan. Terdapat dua konsep yang menjadi landasan teori untuk kasus yang diangkat, diantaranya *national interest* (kepentingan nasional) dan *security dilemma* (dilema keamanan).

a) National Interest

National Interest atau kepentingan nasional adalah sebuah konsep dalam hubungan internasional yang berdasar pada kebutuhan suatu negara. Kebutuhan yang dimaksud disini adalah kebutuhan yang berupa politik-ekonomi, militer hingga pada sosial-budaya. Kepentingan nasional juga merupakan bagian dari *power* suatu negara agar dapat melakukan penyeimbangan kekuatan dengan negara-negara tertentu. Hal ini tentu sejalan dengan tujuan dari adanya konsep *national interest*, yakni sebagai bahan sorotan masyarakat internasional terhadap tindakan yang dilakukan serta menjadi penilaian tersendiri agar mendapat pengakuan dunia. Sehingga tidak heran jika konsep kepentingan nasional hanya memandang perilaku politik luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional sebagai suatu konsep juga dianggap sebagai suatu keterikatan hubungan antara satu negara dengan negara lain. Hubungan yang dimaksudkan disini adalah hubungan interaksi antar negara dalam melakukan pemenuhan kebutuhan. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang ahli teori, yang menyatakan bahwa kepentingan nasional merupakan hubungan antar negara yang tercipta karena adanya perbedaan keunggulan suatu negara dalam memproduksi. Artinya, kepentingan nasional dapat menjadi alasan sebuah negara melakukan hubungan kerjasama untuk mencapai kebutuhan negaranya. Hubungan ini terjalin karena setiap negara memiliki perbedaan keunggulan yang tentunya menajai *power* tersendiri bagi negara tersebut.

Dalam konteks kasus yang diangkat penulis, konsep kepentingan nasional ternyata memiliki peranan penting dalam menganalisis pandangan ASEAN dalam kerjasama pakta pertahanan AUKUS. Dalam konteks ASEAN sebagai organisasi regional kawasan Asia Tenggara ternyata memiliki dilematik tersendiri dalam pengambilan keputusan atau tindakan sebagai organisasi yang melindungi kawasan. Dilematik tersebut tercipta karena adanya kepentingan nasional yang berbeda-beda dari setiap negara anggota ASEAN, ada yang bersifat pro dan ada yang bersifat kontra. Masing-masing negara anggota memiliki perbedaan pandangan, sebab memiliki kepentingan yang berbeda juga. Adanya yang bersifat pro karena adanya keterikatan, dan ada yang bersifat kontra karena adanya ancaman. Negara yang bersifat pro atau mendukung adanya kerjasama pakta pertahanan AUKUS biasanya dilatar belakangi

oleh adanya ketergantungan atau persekutuan dengan suatu negara. sedangkan negara-negara yang bersifat kontra atau kurang setuju dengan adanya kerjasama AUKUS adalah mereka yang merasa terancam dalam aspek stabilitas geografis.⁴

Dalam aspek kerjasama AUKUS, kepentingan nasional juga memiliki pandangan tersendiri. Dimana, kerjasama yang melibatkan tiga negara ini (Australia, Amerika Serikat. Dan Inggris) dilatar belakangi oleh adanya kepentingan masing-masing aktor negara. misalnya, negara Amerika merancang kerjasama dalam pertahanan dan keamanan karena ingin melakukan penyeimbangan kekuatan dengan negara China dalam pemberian pengaruh di kawasan Asia khususnya Asia Tenggara. Sedangkan, Inggris juga melibatkan diri karena ia adalah salah satu negara sekutu dari Amerika Serikat. Lalu, Australia juga menjadi bagian dalam kerjasama ini karena adanya kepentingan nasional Australia dalam hal teknologi milik Amerika Serikat.⁵

Jadi, konsep ini ingin menyatakan bahwa semua negara pasti memiliki kepentingan nasional. Mereka akan selalu berupaya memenuhi kepentingan tersebut sebagai tindakan dalam meningkatkan negaranya. Masyarakat internasional tidak mampu menutup mata terkait hal ini, sebab kepentingan nasional tidak terhindarkan dari setiap aktor. Kepentingan nasional dan negara adalah satu kesatuan utuh yang saling berikatan.

b) Security Dilemma

Konsep *security dilemma* atau dilema keamanan sebuah konsep yang memperlihatkan suatu situasi sebuah negara sulit mengambil tindakan atau keputusan terhadap suatu problema, terutama hal-hal yang mengarah pada pertahanan dan keamanan. Konsep ini memandang bahwa terdapat satu kondisi tertentu dimana suatu aktor tidak mampu mengambil sebuah keputusan secara cepat tanpa melewati situasi dilema. Dalam konsep dilema keamanan, terdapat tiga level analisis, level pertama adalah individu, dimana ketidakpastian seorang pemimpin saat berusaha menafikan pemimpin lain, level kedua adalah politik domestik yang terjadi akibat bias dari kapabilitas nasional yang di buat oleh unit pemerintahan, dan yang level terakhir adalah sistem internasional yang dimana kondisi suatu negara dipaksa untuk menjamin keamanan pada dirinya sendiri.⁶

Berdasarkan pada ketiga level analisis dilema keamanan, level yang paling tersentuh dengan kasus ini adalah level ketiga yakni sistem internasional. Dalam level sistem internasional ditemukan sebuah kondisi dimana setiap aktor atau subjek tertentu harus mampu menjamin keamanannya sendiri. Dalam konteks ASEAN sebagai organisasi regional yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga pertahanan dan keamanan kawasan tentu mengalami kondisi level ketiga. Dimana, saat mengalami sebuah problema terkait adanya kerjasama pakta pertahanan yang terbentuk oleh trilateral menjadi isu tersendiri yang harus di atasi oleh ASEAN. ASEAN secara

⁴ Burchill, Scott, *The National Interest in International Relations Theory* (Palgrave MacMillan, 2005).

⁵ Burchill, Scott.

⁶ Sibadu, Muhammad Furqan Naim A., "Kajian Strategis: Konsep Dilema Keamanan Dan Deterrence Dalam Kekuatan Militer Negara Indonesia," Agustus 2022, <https://unifers.unifa.ac.id/detailpost/kajian-strategis-konsep-dilema-keamanan-dan-deterrence-dalam-kekuatan-militer-negara-indonesia>.

subjektif harus memapu mengambil tindakan dalam problema ini. Namun, hal yang menjadi dilema bagi negara ASEAN adalah ketidaksepakatan seluruh negara anggota ASEAN dalam menyikapi hal ini. Terdapat beberapa negara anggota yang mendukung adanya kerjasama AUKUS ini meskipun mereka tau bahwa ini secara tidak langsung memberi ancaman terhadap kawasan, dan ada pula yang memang telah memberi penolakan terhadap adanya kerjasama pakta pertahanan ini. Adanya perbedaan pandangan yang dimiliki oleh setiap negara anggota, membuat ASEAN tidak mampu melakukan tindakan. Sehingga terjadilah sebuah dilema keamanan yang dialami oleh kawasan ASEAN.

PEMBAHASAN

Dalam pakta pertahanan yang di bentuk melalu kerjasama AUKUS ini, memiliki tujuan utama untuk mengantisipasi adanya kekuatan militer negara China di kawasan Asia terutama Asia Tenggara. Tujuan ini satu sisi dinilai positif sebab dapat meningkatkan keamanan kawasan, namun disisi lain menjadi bumerang tersendiri bagi negara-negara kawasan ASEAN. Saat ini ASEAN sebagai organisasi regional tengah di apit oleh dua kekuatan militer yang sangat berpengaruh di dunia, terdapat aliansi militer dari China dan aliansi militer dari AUKUS selaku manuver Amerika Serikat. Meskipun AUKUS dinilai membawa dampak positif, tetapi ASEAN hingga saat ini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait pak pertahanan AUKUS.⁷

Kebungaman ASEAN terhadap kasus ini di prediksi terdapat dua faktor. Faktor yang pertama, adalah ketidaksamaan pandangan seluruh negara anggota ASEAN. Sedangkan faktor yang kedua adalah adanya kesulitan dari prinsip non-intervensi yang diterapkan ASEAN sehingga setiap negara lebih menyikapi isu-isu yang bersifat domestik di dalam negaranya. Berikut akan dibahas lebih deskripsif tentang faktor yang menjadi alasan kebangkamaan ASEAN sebagai organisasi regional.

1. Pandangan negara ASEAN

Adanya kepentingan nasional yang berbeda menyebabkan negara-negara ASEAN tidak memiliki kesamaan sikap dalam menyikapi kerjasama AUKUS yang dibentuk oleh tiga negara power. Bahkan dinilai bahkan, ketidaksamaan pandangan ini dilatar belakangi oleh pandangan yang berbeda tentang China di kawasan Asia Tenggara. Seperti dalam kasus Laut Cina Selatan yang merupakan sebuah kasus yang melibatkan hampir seluruh negara-negara ASEAN membuat negara-negara kawasan memiliki sikap yang pro dan kontra terhadap tindakan China. Adanya pengaruh negara China di kawasan Asia tenggara menjadi sinkronisasi tersendiri diperbedaan sikap masing-masing negara. Hal ini makin di perkuat dari adanya sebuah data yang memperlihatkan

⁷ Putro, Yehuda Bimo Yudianto Purwantoro, "Menyikapi Potensi Eskalasi Konflik Di Kawasan Indo-Pasifik Sebagai Dampak Dari Kesepakatan Aukus Read More: <https://setkab.go.id/Menyikapi-Potensi-Eskalasi-Konflik-Di-Kawasan-Indo-Pasifik-Sebagai-Dampak-Dari-Kesepakatan-Aukus/>," *Sekretariat Kabinet RI*, November 17, 2021, sec. Opini, <https://setkab.go.id/menyikapi-potensi-eskalasi-konflik-di-kawasan-indo-pasifik-sebagai-dampak-dari-kesepakatan-aukus/>.

pengelompokan sikap negara-negara ASEAN terkait kepentingannya di hadapan China dan Amerika Serikat. Kategori tersebut diantaranya⁸:

Tabel 1.1 Pro Kontra Negara ASEAN

1.	Pro AUKUS	Filiphina, Singapura, Vietnam
2.	Kontra AUKUS	Indonesia dan Malaysia
3.	Pro China	Kamboja, Laos, Brunei Darussalam
4.	Abstain	Thailand dan Myanmar

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa negara-negara yang pro AUKUS adalah negara-negara sekutu dari pendiri AUKUS, dan yang kontra dengan AUKUS adalah negara yang tidak memiliki hubungan yang sangat sentral dengan Amerika Serikat. Sedangkan negara yang pro China adalah negara yang memiliki keberpihakan dengan China terutama dalam hal Laut Cina Selatan. Dan untuk Thailand dan Myanmar lebih memilih untuk tidak berpihak di antara keduanya, hal ini juga belum di ketahui pasti alasan yang melatar belakangi mereka untuk abstain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara-negara ASEAN yang berselisih dengan China secara otomatis mereka akan bersikap kontra dengan AUKUS selaku manuver dari Amerika Serikat. Namun, ada juga yang negara yang berselisih dengan China tetapi juga menolak adanya kerjasama pakta pertahanan AUKUS yakni Indonesia dan Malaysia. Bahkan ada pula yang keterbalikannya, memiliki kasusu dengan China di Laut China Selatan tetapi mendukung adanya AUKUS yakni Vietnam dan Filiphina.

2. Kebijakan Non-Intervensi ASEAN

Kebungkaman ASEAN akibat dari prinsip non-intervensi bukanlah sesuatu hal yang istimewa. Kebungkamannya akibat prinsip yang diterapkannya mengakibatkan banyak kasus-kasus yang telah terjadi di kawasan Asia Tenggara yang tidak mampu di selesaikan dengan baik oleh ASEAN selaku organisasi regional. Contoh kasus yang masih melekat hingga sekarang adalah kasus muslim rohingnya yang terjadi di Myanmar, kasus lainnya berupa pkudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap penggulingan pemimpin *de Facto* Aung San Suu Kyi dan lain-lain. Dari kasus-kasus tersebut, ASEAN tidak mengambil peran yang lebih banyak karena keterbatasan pada prinsip non-intervensi. Dan hal ini bukan hanya di lakukan sekali oleh ASEAN sebagai organisasi regional, tetapi telah berulang kali dengan kasus yang berbeda-beda.⁹

⁸ Rakhmat, Muhammad Zulfikar, "Membongkar Alasan ASEAN Bungkam Dalam Merespons Perjanjian AUKUS," *The Conversation Indonesia*, Oktober 2022, <https://theconversation.com/membongkar-alasan-asean-bungkam-dalam-merespons-perjanjian-aukus-169640>.

⁹ Rakhmat, Muhammad Zulfikar.

PENUTUP

Berdasarkan informasi dan hasil riset, dapat disimpulkan bahwa hambatan ASEAN dalam menyikapi kasus kerjasama AUKUS dalam aspek pertahanan dan keamanan kawasan ternyata belum terlihat. Hal ini terjadi karena adanya dua aspek yang menjadi faktor penyebab ASEAN masih bungkam dalam mengatasi kasus ini. Faktor yang pertama dilihat dari ketidaksamaan pandangan seluruh anggota ASEAN dalam menyikapi kerjasama AUKUS. Sedangkan faktor yang kedua terlihat dari adanya prinsip non-intervensi. Dari kedua faktor, dapat diidentifikasi bahwa seluruh anggota ASEAN masih berpendirian teguh pada kepentingan nasional masing-masing. Selain itu, adanya prinsip non-intervensi yang di terapkan secara universal oleh ASEAN menjadi kesulitan tersendiri bagi organisasi regional ini dalam menyikapi kasus yang ada. Sehingga kondisi inilah yang membuat ASEAN mengalami dilema keamanan, ASEAN masih bungkam dalam belum terlihat tindakan yang seharusnya di lakukan.

Adapun saran yang dapat di berikan dari penulis adalah, pengidentifikasian prinsip non-intervensi. Dimana, menurut pandangan penulis terkadang ada suatu kondisi ASEAN harus beraliansi dengan negara lain untuk tetap menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan kewasannya. Di satu sisi, prinsip non-intervensi kadang kurang terhubung dengan kasus-kasus tertentu. tetapi disisi lain, alainsi kadang juga di perlukan, agar ASEAN mampu menjadi ranah yang disegani oleh kawasan dalam menyelesaikan suatu problematik. Sama halnya dengan kerjasama AUKUS, meskipun hingga saat ini ASEAN belum mengeluarkan kebijakan secara resmi atau masih bungkam terhadap kondisi yang ada, ASEAN harus tetap memperhatikan bahwa kehadiran AUKUS di kawasan Asia Tenggara memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap stabilitas keamanan regional.

DAFTAR PUSTAKA

- Burchill, Scott. *The National Interest in International Relations Theory*. Palgrave MacMillan, 2005.
- Nindya, Annisa Putri, and Rifqy Alief Abiyya. "Pengaruh AUKUS Terhadap Stabilitas Indo-Pasifik Dan Sikap Indonesia [The Influence of AUKUS to Indo-Pacific Regional Stability and Indonesia's Stance]." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 13, no. 1 (June 20, 2022): 67–84.
<https://doi.org/10.22212/jp.v13i1.2917>.
- Palabbi, Sahbuddin Dg. "Pakta Pertahanan AUKUS: Respon Negara-Negara ASEAN Dan Peran Indonesia.," 2022.
- Prakoso, Lukman Yudho. "AUKUS Peluang Dan Kendala Bagi Indonesia." *Jurnal Maritim Indonesia* 9, no. 3 (2021).
- Putro, Yehuda Bimo Yudanto Purwanto. "Menyikapi Potensi Eskalasi Konflik Di Kawasan Indo-Pasifik Sebagai Dampak Dari Kesepakatan Aukus Read More: <https://Setkab.Go.Id/Menyikapi-Potensi-Eskalasi-Konflik-Di-Kawasan-Indo-Pasifik-Sebagai-Dampak-Dari-Kesepakatan-Aukus/>." *Sekretariat Kabinet RI*, November 17, 2021,

Wiwi Ramadani dan Ahyul Haitsam: Hambatan ASEAN sebagai Organisasi Regional Dalam Merealisasikan Pertahanan dan Keamanan lewat Kerjasama AUKUS (Australia, United Kingdom and United States)

sec. Opini. <https://setkab.go.id/menyikapi-potensi-eskalasi-konflik-di-kawasan-indo-pasifik-sebagai-dampak-dari-kesepakatan-aukus/>.

Rakhmat, Muhammad Zulfikar. "Membongkar Alasan ASEAN Bungkam Dalam Merespons Perjanjian AUKUS." *The Conversation Indonesia*, Oktober 2022.

<https://theconversation.com/membongkar-alasan-asean-bungkam-dalam-merespons-perjanjian-aukus-169640>.

Sibadu, Muhammad Furqan Naim A. "KAJIAN STRATEGIS: KONSEP DILEMA KEAMANAN DAN DETERRENCE DALAM KEKUATAN MILITER NEGARA INDONESIA,"

Agustus 2022. <https://unifers.unifa.ac.id/detailpost/kajian-strategis-konsep-dilema-keamanan-dan-deterrence-dalam-kekuatan-militer-negara-indonesia>.